

2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2011 s.d. 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya penataan produk hukum dan meningkatnya budaya taat hukum	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi		Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi	persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	619	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	1150	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	1280	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	940	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	1010	100% (600 Produk Hukum Provinsi)	1140	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)	4999	Biro Hukum	
				Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda dan pergub Provinsi jambi yang dikaji dan dievaluasi	50 Perda dan Pergub	10 Perda dan Pergub	106	10 Perda dan Pergub	200	10 Perda dan Pergub	250	10 Perda dan Pergub	270	10 Perda dan Pergub	280	10 Perda dan Pergub	290	60 Perda dan Pergub	1396	Biro Hukum	
				Kegiatan: Legeslasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Prolegda Provinsi Jambi yang disusun	5 dok prolegda	1 dok prolegda	80	1 dok prolegda	100	1 dok prolegda	110	1 dok prolegda	120	1 dok prolegda	130	1 dok prolegda	150	6 dok Prolegda	690	Biro Hukum	
				Kegiatan: Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Gubernur yang sesuai deng peraturan perundang-undangan	302 Pergub	50 Pergub	120	50 Pergub	170	50 Pergub	180							150 Pergub	470	Biro Hukum	
				Kegitan: Penelitian / Pengkajian Terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan	3132 SK dan Instruksi	540 SK dan Instuksi Gub Jambi	96	540 SK dan Instuksi Gub Jambi	180	540 SK dan Instuksi Gub Jambi	190							1620%	466	Biro Hukum	
				Kegiatan: Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	Jumlah Pergub, SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai deng Peraturan Per Undang-Undangan								50 Pergub	200	50 Pergub	220	50 Pergub	230	150 Pergub	650	Biro Hukum	
													540 SK dan Instuksi Gub Jambi	200	540 SK dan Instuksi Gub Jambi	220	540 SK dan Instuksi Gub Jambi	240	1620 SK dan Instuksi Gub Jambi	660	Biro Hukum	
				Kegiatan: Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan	62 perda	12 perda	217	12 perda	500	12 perda	550	12 perda	550	12 perda	600	12 perda	700	72 perda	3117	Biro Hukum	
				Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	Program pembinaan dan pengawasan produk hukum kab/kota di provinsi jambi	persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (520 Produk Hukum Kab/Kota)	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	500	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	490	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	490	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	490	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	370	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	370	100 (100 Produk Hukum Kab/Kota)	2710	Biro Hukum
		Kegiatan : Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	2 Rakor	1 rakor	53	1 rakor	120	1 rakor	120							3 rakor	293	Biro Hukum			

					Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada bupati /kota	0	1 Bimtek	56	1 Bimtek	120	1 Bimtek	120	50 perda dan Perbub/Perwako	370					3 Bimtek	666	Biro Hukum
					Kegiatan : Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi	140 perda dan Perbub/Perwako	50 perda dan Perbub/Perwako	118	50 perda dan Perbub/Perwako	250	50 perda dan Perbub/Perwako	250	1 Bimtek	120					150 perda dan Perbub/Perwako	738	Biro Hukum
					Kegiatan : Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan Bimbingan teknis kab/kota	140 perda dan Perbub/Perwako									50 perda dan Perbub/Perwako	370	50 perda dan Perbub/Perwako	370	150 perda dan Perbub/Perwako	740	Biro Hukum
							0									1 Bimtek		1 Bimtek		3 Bimtek		Biro Hukum
					Kegiatan : Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten /Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	380 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	256	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	450	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	450							240 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	1156	Biro Hukum
					Kegiatan : Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub/Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Kab/Kota	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi	380 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota							80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD	570	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota	570	80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD	570	240 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan	1710	Biro Hukum
						Jumlah Rakor Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi	2 Rakor							1 rakor		1 rakor		1 rakor		3 rakor		
				Persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	Program Advokasi Hukum dan HAM	persentase penyelesaian kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi	100%	100%	949	100%	1320	100%	1440	100%	1525	100%	1450	100%	1515	95%	8199	Biro Hukum
					Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Intansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	17	4	125	4	150	4	170	4	360	4	380	4	400	24	1585	Biro Hukum
					Kegiatan : Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum	30 Kasus	7 Kasus	482	10 Kasus	600	10 Kasus	650	11 Kasus	660	12 Kasus	680	15 Kasus	690	65 Kasus	3762	Biro Hukum

					Kegiatan: Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi Jambi	Jumlah kasus HAM yang dikaji/terinventarisir	35	11 pengkajian dan menginventarisir	73	11 pengkajian dan menginventarisir	120	11 pengkajian dan menginventarisir	120	11 pengkajian dan menginventarisir	130	11 pengkajian dan menginventarisir	140	11 pengkajian dan menginventarisir	150	66 pengkajian dan menginven- tarisir	733	Biro Hukum
					Kegiatan: Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi	5 Rakor HAM	1 Rakor HAM	132	1 Rakor HAM	180	1 Rakor HAM	200	1 Rakor HAM	225	1 Rakor HAM	250	1 Rakor HAM	275	6 Rakor HAM	1262	Biro Hukum
					Kegiatan : Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Cuma-Cuma	Jumlah Batuan Hukum dan Konsultasi hukum	0	5 Bantuan	137	10 Bantuan	150	10 Bantuan	170							25 Batuan	457	Biro Hukum
					Kegiatan : Inventarisasi dan Pengkajian Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Konflik/ Sengketa Hukum yang dikaji	0	0%	0	25 kajian	120	25 kajian	130	25 kajian	150					125 kajian	400	Biro Hukum
					Kegiatan : Pembinaan dan Penanganan Terhadap Konflik/ Sengketa Hukum yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Konflik/ Sengketa Hukum yang dikaji										25 kajian	170	25 kajian	190	125 kajian	360	Biro Hukum
		Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik		Program dokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100%	100%	520	100%	390	100%	430	100%	80	100%	90	100%	100	100%	1610	Biro Hukum

		hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah		Kegiatan: Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Data Perda Pergu Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum	62 Perda dan 302 Pergub	12 Perda dan 50 Pergub	192	12 Perda dan 50 Pergub	200	12 Perda dan 50 Pergub	220						36 Perda dan 150 Pergub	612	Biro Hukum						
				Kegiatan: Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah Peraturan Perundangan yang disosialisasikan	0	4 Peraturan perundangundangan	30	8 Peraturan perundangundangan	70	8 Peraturan perundangundangan	80	8 Peraturan perundangundangan	80	8 Peraturan perundangundangan	90	8 Peraturan perundangundangan	100	44 Peraturan perundang-undangan	450	Biro Hukum					
				Kegiatan: Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa	25 Perda/Pergub	5 Perda/Pergub	112	6 Perda/Pergub	120	7 Perda/Pergub	130						18 Perda/Pergub	362	Biro Hukum						
				Kegiatan: Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan perundang-undangan	jumlah Data Perda Pergu Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum	62 Perda dan 302 Pergub						12 Perda dan 50 Pergub	380	12 Perda dan 50 Pergub	400	12 Perda dan 50 Pergub	320	36 Perda dan 150 Pergub	1100	Biro Hukum						
					Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa	25 Perda/Pergub						8 Perda/Pergub		9 Perda/Pergub		10 Perda/Pergub		27 Perda/Pergub								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	30%	30%	182	40%	300	50%	320	60%	150	70%	150	80%	150	80%	1252	Biro Hukum					
				Kegiatan: Penataan administrasi Tata Usaha/Kepegawaian/Pengelolaan Barang Biro Hukum	Persentase pelayanan administrasi tata usaha Biro Hukum	100%	100%	182	100	300	100%	320	100%	150	100%	150	100%	150	100%	1252	Biro Hukum					
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	cc	cc	77	cc	120	≥ cc	130	≥ cc	180	≥ cc	180	≥ B	200	≥ B	887	Biro Hukum					
				Kegiatan: Penyusunan Progran/Kegiatan,Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum	Jumlah Renja	5 dok	1 dok	77	1 dok	120	1 dok	130							3dok	327	Biro Hukum					
					Jumlah LPPD	5 dok	1 dok		1 dok		1 dok															3 dok
					Jumlah LKPJ	5 dok	1 dok		1 dok		1 dok						1 dok									3 dok
					Jumlah LKj	5 dok	1 dok		1 dok		1 dok															3 dok
					Jumlah Laporan 6 januari	5 dok	1 dok		1 dok		1 dok						1 dok									
				Kegiatan: Koordinasi, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum serta Penyusunan Program/Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro								5 dok	180	5 dok	180	5 dok	200	15 dok	560	Biro Hukum					